

**EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH
(SIPD) DALAM MENINGKATKAN PELAPORAN KEUANGAN
DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN
GIANYAR PROVINSI BALI**

Oleh

I Kadek Jodi Setyawan

NPP. 30.1047

Asdaf Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali

Program Studi Keuangan Publik

Email: kdjodisetyawan13@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Asep Hendra, SE, MM.

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Regional governments have the authority to carry out regional financial management independently to increase accountability for regional treasury management. SIPD, especially in regional financial management, has been integrated into one network that connects local governments with the Directorate General of Regional Financial Development so that activity and budget data in regional government financial management can be directly supervised by the Directorate General of Regional Financial Development. **Purpose:** The purpose of this research is to analyze out the implementation of the CHSE Certification Program in order to create security and comfort for tourists who are traveling. **Method:** This research uses a descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques used for this research are interviews, observation, and documentation. **Result:** The result of this study shows that the implementation of the Regional Government Information System (SIPD) in Improving Regional Financial Reporting at the Regional Financial and Asset Management Agency of Gianyar Regency it has not been effective. Factors inhibiting the implementation of the Regional Government Information System (SIPD) include outreach, training and training regarding the implementation of the Regional Government Information System (SIPD) which has not been carried out routinely, assistant staff and human resources from employees at the Gianyar Regency Regional Financial and Asset Management Agency who have not mastered the SIPD application, the Central Government which has not provided follow-up on the obstacles reported by the BPKAD of Gianyar Regency in the Application of the Regional Government Information System (SIPD), the financial management system in the application of the Regional Government Information System (SIPD) which has not been fully operational. **Conclusion:** Several efforts were made to overcome these obstacles, namely conducting outreach in the form of training and training regarding the application of the Regional Government Information System (SIPD), providing information and training directly to employees of the Gianyar Regency Regional Financial and Asset Management Agency, using the Regional Management Information System application. Next Generation (SIMDA-NG) to assist the BPKAD of Gianyar Regency in dealing with financial management issues.

Keywords: Effectiveness, Regional Government Information System, Reporting

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pemerintah daerah mempunyai kewenangan dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah secara mandiri untuk meningkatkan pertanggung jawaban atas pengelolaan kas daerah. SIPD khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah telah terintegrasi dalam satu jaringan yang menghubungkan pemerintah daerah dengan Direktorat Jendral Bina Keuangan Daerah sehingga data kegiatan dan anggaran dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat langsung diawasi oleh Direktorat Jendral Bina Keuangan Daerah. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan mengetahui efektivitas penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam meningkatkan pelaporan keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar yang ditinjau dengan 3 dimensi yakni pencapaian tujuan, adaptasi dan integrasi. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu bahwa penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Meningkatkan Pelaporan Keuangan Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Gianyar belum efektif. Faktor penghambat penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) antara lain adalah sosialisasi, pelatihan dan diklat mengenai penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) belum dilaksanakan dengan rutin, tenaga pendamping dan sumber daya manusia dari para pegawai di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar yang belum menguasai aplikasi SIPD, Pemerintah Pusat yang tidak memberikan tindak lanjut terhadap hambatan yang dilaporkan oleh BPKAD Kabupaten Gianyar dalam Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), sistem pengelolaan keuangan di aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang belum berjalan keseluruhan.

Kesimpulan: Beberapa upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut yaitu melakukan sosialisasi berupa pelatihan dan diklat mengenai penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), memberikan informasi dan pelatihan secara langsung kepada pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar, menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Next Generation (SIMDA-NG) agar membantu BPKAD Kabupaten Gianyar dalam menangani masalah pengelolaan keuangan.

Kata kunci: Eektivitas, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Pelaporan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia sekarang ini sedang dalam proses pembangunan menuju pemerintahan Good Governance. Pemerintahan yang Good Governance mempunyai ciri khas pelaksanaan pemerintahan yakni transparansi, partisipasi, serta akuntabilitas yang menjadi dasar dalam penerapan sistem tersebut. Penerapan Good Governance di pemerintah daerah khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan sangatlah berperan penting agar mencapai keuangan yang dilaporkan secara transparan serta akuntabel sehingga pemerintah daerah dapat menjalankan otonomi daerahnya dengan baik.

Menurut Halim menjelaskan bahwa “tata kelola keuangan daerah adalah semua aktivitas keuangan yang mencakup mengenai pelaksanaan, perencanaan, penatausahaan, pengawasan, pelaporan, serta pertanggungjawaban keuangan daerah.” Pemerintah mempunyai kewenangan mengatur tata kelola keuangan daerah dari aktivitas pelaksanaan, perencanaan, penatausahaan, pengawasan, pelaporan, serta pertanggungjawaban dengan sistematis dan transparan sehingga tercapainya output (hasil) laporan keuangan yang baik dan optimal.

Upaya mencapai suatu transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien yang dilakukan pemerintah untuk tata kelola keuangan daerah, dibuatlah suatu aturan yang berguna dalam pelaksanaan tata kelola keuangan. Salah satu bentuk penerapan dari pemerintah yaitu SIPD atau Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

SIPD merupakan suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa “pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling berhubungan untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah”. Setiap pemerintahan kabupaten/kota hingga provinsi diharapkan dapat menerapkan sistem informasi ini dalam tata kelola keuangan daerah. Penerapannya bertujuan agar tercapainya tata kelola keuangan secara efisien serta efektif dalam pemerintahan yang baik (Good Governance) serta dapat terwujudnya penilaian Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas penyajian laporan keuangan daerah.

Kepala BPKAD Kabupaten Gianyar mengatakan juga bahwa meskipun SIPD memberikan banyak manfaat dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Gianyar, yaitu memudahkan dalam penginputan data, ketepatan dalam perhitungan, kecepatan pemrosesan data, efisiensi dalam waktu dan biaya, transparansi anggaran, dan mempercepat proses penyusunan laporan keuangan yang digunakan sebagai sarana pengambil keputusan oleh pimpinan. Namun pada kenyataannya, masih ditemukan kendala dalam penerapan sistem informasi tersebut. Tidak semua pegawai dari Pemerintah Kabupaten Gianyar mahir dan mampu melakukan pengelolaan sistem ini.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, maka penulis mempunyai ketertarikan untuk meneliti mengenai Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Gianyar Provinsi Bali yang tercantum dalam penelitian riset terapan pemerintahan dengan judul “EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) DALAM MENINGKATKAN PELAPORAN KEUANGAN DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

SIPD memberikan banyak manfaat dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Gianyar, yaitu memudahkan dalam penginputan data, ketepatan dalam perhitungan, kecepatan pemrosesan data, efisiensi dalam waktu dan biaya, transparansi anggaran, dan mempercepat proses penyusunan laporan keuangan yang digunakan sebagai sarana pengambil keputusan oleh pimpinan. Namun pada kenyataannya, masih ditemukan kendala dalam penerapan sistem informasi tersebut. Tidak semua pegawai dari Pemerintah Kabupaten Gianyar mahir dan mampu melakukan pengelolaan sistem ini. Hambatan dan kendala pada sistem informasi ini memberikan pengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Gianyar adalah struktur organisasi yang tidak sesuai, tidak tepat waktu proses penggajian pegawai, belum sesuai Rencana Anggaran Kas (RAK) per triwulan yang di input dengan Surat Penyediaan Dana (SPD) yang diterbitkan serta proses penyaluran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang tidak efektif dan efisien diakibatkan belum terintegrasikannya data dalam sistem.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah dengan memanfaatkan SIPD sangat bermanfaat bagi penulis yang dapat digunakan sebagai pedoman, referensi, serta pertimbangan dalam proses penyusunan penelitian ini. Penelitian sebelumnya dapat memberikan evaluasi dalam pengembangan pengetahuan agar kendala yang terjadi saat ini tidak mengalami hambatan kedepannya.

Persamaan penelitian selanjutnya yang dikaji oleh Nanda Dias yaitu tentang “Efektivitas Penerapan Aplikasi SIPD Dalam Penyusunan Dokumen RKPD di Kabupaten Nganjuk”. Dalam penelitiannya tersebut menggunakan teori yang sama yaitu menggunakan teori efektivitas yang berkorelasi terhadap implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Namun, perbedaannya terletak pada obyek permasalahan yang diambil. Penelitian sebelumnya mengambil permasalahan yang terletak pada Penyusunan Dokumen RKPD, sedangkan penulis akan mengambil permasalahan Pelaporan Keuangan Daerah.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni tentang permasalahan Pelaporan Keuangan Daerah. Kelebihan penelitian yang penulis bahas mengenai efektivitas penerapan SIPD untuk meningkatkan pelaporan keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar Provinsi Bali adalah dokumen yang diambil merupakan dokumen termuktahir, sehingga pada penelitian menjadi pembaruan dari penelitian sebelumnya dan menghasilkan hasil penelitian yang terbaru berbeda dari penelitian sebelumnya

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam pelaporan keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar Provinsi Bali. Selain itu juga untuk mengetahui hambatan dalam penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam meningkatkan pelaporan keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar Provinsi Bali. Serta untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Gianyar untuk meningkatkan penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sehingga dapat meningkatkan pelaporan keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar Provinsi Bali

II. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat kualitatif menggunakan metode deskriptif serta pendekatan induktif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini mengambil sumber data yang akan diamati bertempat di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar Provinsi Bali. Penulis menggunakan teknik pengambilan sampel informan *Purposive Sampling* dan *Snowball*. Adapun narasumber pada penelitian ini yaitu Kepala BPKAD Kabupaten Gianyar, Kabid Penetapan BPKAD Kabupaten Gianyar, Kabid Pengelolaan Informasi Teknologi BPKAD Kabupaten Gianyar, Kabid Pengelolaan Informasi Teknologi BPKAD Kabupaten Gianyar, Kabid Keuangan BPKAD Kabupaten Gianyar, Kabid Aset BPKAD Kabupaten Gianyar, Kasubbid Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan BPKAD Kabupaten Gianyar, Kasubbid Akuntansi BPKAD Kabupaten Gianyar, Kasubbid Pembukuan dan Pelaporan BPKAD Kabupaten Gianyar

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 terkait “Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung dan berkaitan untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah”.

SIPD merupakan suatu aplikasi yang sangat berguna bagi pemerintah daerah terkait tata kelola keuangan daerah. SIPD memberikan kemudahan kepada pemerintah daerah pada penyusunan dan penyelenggaraan anggaran, serta pelaporan keuangan daerah berlandaskan asas ekonomis, efisiensi, transparan, auditabel, efektif, dan akuntabel.

3.2. Penerapan SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) Dalam Meningkatkan Pelaporan Keuangan Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar Provinsi Bali

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada Kepala Bidang Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar Bapak I Wayan Suardana, SE., MAP di ruang kerja beliau adalah sebagai berikut :

“Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) mulai diterapkan di Kabupaten Gianyar pada tahun 2021. Pemerintah Pusat mewajibkan menggunakan SIPD dalam pengelolaan keuangan di Kabupaten Gianyar. Saat ini SIPD di Kabupaten Gianyar belum bisa terlaksana secara keseluruhan, baru sampai tahap perencanaan dan penganggaran. Namun, pada tahun 2024 kami akan menerapkan SIPD secara keseluruhan pada pengelolaan keuangan sesuai dengan instruksi dari Menteri Dalam Negeri”.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Kepala Sub Bidang Akuntansi BPKAD Kabupaten Gianyar Bapak Wayan D. Maheka Yudha, SE menyatakan bahwa :

“Aplikasi SIPD di Kabupaten Gianyar mulai disosialisasikan pada tahun 2020 dan diterapkan pada tahun 2021, dimana aplikasi ini digunakan untuk mempermudah proses pengelolaan keuangan di BPKAD Kabupaten Gianyar. SIPD di Kabupaten Gianyar belum sepenuhnya dilaksanakan dikarenakan masih sampai tahap perencanaan dan penganggaran. Hal ini dikarenakan minimnya sosialisasi yang menyebabkan SIPD sampai saat ini belum bisa diterapkan secara menyeluruh untuk pengelolaan keuangan di BPKAD Kabupaten Gianyar”.

Penulis juga melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Teknologi Bapak Anak Agung Gde Agung Semara Putra, S.Sos mengatakan bahwa “Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) telah diterapkan di Kabupaten Gianyar pada tahun 2021, dimana dalam penerapan aplikasi ini sampai saat ini belum bisa dilaksanakan secara keseluruhan.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Gianyar Provinsi Bali sudah menggunakan aplikasi SIPD dalam pengelolaan keuangan, sehingga dapat mewujudkan pengelolaan keuangan BPKAD yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Penerapan SIPD di BPKAD Kabupaten Gianyar Provinsi Bali sejak tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa indikator kurun waktu pencapaian belum efektif secara optimal, karena SIPD sendiri sudah disosialisasikan pada tahun 2020, namun di BPKAD Kabupaten Gianyar Provinsi Bali baru menerapkannya pada tahun 2021 dan penerapannya dalam pengelolaan keuangan belum terlaksana secara keseluruhan”.

3.3. Dasar Hukum

Dasar hukum merupakan pedoman yang digunakan dalam penerapan SIPD dalam meningkatkan pelaporan keuangan daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar Provinsi Bali. dengan adanya aplikasi SIPD ini dapat menimbulkan terwujudnya pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif sesuai dengan tujuan yang terdapat dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi SIPD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Berkaitan dengan dimensi pencapaian tujuan dan indikatornya yaitu, kurun waktu pencapaian, sasaran dan dasar hukum, penerapan aplikasi SIPD dalam meningkatkan laporan keuangan daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar Provinsi Bali belum dapat dikatakan efektif. Hal ini disebabkan oleh indikator sasaran belum

tercapai yang disebabkan oleh aplikasi SIPD yang baru sampai tahap penatausahaan dan belum mencapai tahap pelaporan.

Implementasi dari program yang dijalankan sudah berlandaskan Peraturan Bupati, Peraturan Gubernur dan Peraturan Menteri, serta terdapat petunjuk dalam pelaksanaannya dan terdapat teknis dari penerapan sistem tersebut. Sehingga standar dari kebijakan ini sudah jelas dan telah memenuhi kriteria yang terdapat pada indikator ini.

3.4. Prosedur

Prosedur penerapan dari aplikasi SIPD di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar Provinsi Bali belum tercapai dengan efektif. Hal tersebut dikarenakan pelatihan yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam penerapan SIPD ini hanya berbasis Video yang menyebabkan pegawai kurang bisa memahami prosedur penggunaan aplikasi SIPD ini dengan optimal, sehingga Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar Provinsi Bali masih menggunakan aplikasi SIMDA-NG dalam pengelolaan keuangannya.

Pada dimensi integrasi dalam teori efektivitas Duncan dalam Richard M. Steers belum efektif. Hal ini dapat dilihat pada indikator prosedur dan prosedur sosialisasi yang belum terwujud dengan baik. Prosedur penerapan SIPD belum tersampaikan dengan baik, sehingga pegawai di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar Provinsi Bali belum paham secara mendalam dengan penerapan SIPD secara keseluruhan.

3.5. Peningkatan Kemampuan

Peningkatan kemampuan merupakan tolak ukur dalam tahap adaptasi. Peningkatan kemampuan ini dapat dilihat dari awalnya aplikasi pengelolaan keuangan berbasis software kemudian berkembang menjadi aplikasi pengelolaan keuangan yang berbasis web.

peningkatan kemampuan yang menjadi tolak ukur dalam penerapan SIPD di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar Provinsi Bali belum meningkat signifikan. Hal ini disebabkan oleh dalam penerapan SIPD di BPKAD Kabupaten Gianyar Provinsi Bali masih mengalami hambatan seperti belum tercapainya pengelolaan keuangan secara keseluruhan, dimana hanya proses perencanaan dan penganggaran yang dapat terlaksana dengan baik. Selanjutnya, dalam penerapannya juga BPKAD Kabupaten Gianyar Provinsi Bali sudah mencoba sampai ke tahap pelaporan namun output yang dihasil masih tergolong tidak memenuhi pencapaiannya yaitu kualitas laporan keuangan yang baik. Hal ini membuktikan bahwa SIPD dalam peningkatan kemampuan belum efektif penerapannya di BPKAD Kabupaten Gianyar Provinsi Bali.

3.6. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasana merupakan alat yang diperlukan dalam penerapan aplikasi SIPD agar memperlancar dan memudahkan dalam proses pengelolaan keuangan. Sarana dan prasarana berhubungan secara langsung ialah fasilitas yang dapat menunjang dalam efektivitas penerapan aplikasi SIPD dalam meningkatkan pelaporan keuangan di BPKAD Kabupaten Gianyar Provinsi Bali.

Sarana dan prasarana di kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar sudah dapat menunjang pegawai dalam proses pengelolaan keuangan melalui aplikasi SIPD. Setiap kantor atau ruangan disediakan masing-masing 10 unit komputer dan jaringan internet dalam aktivitas pengelolaan keuangan. Namun, sewaktu-waktu server pusat dari SIPD mengalami gangguan yang menyebabkan SIPD ini tidak dapat diakses.

3.7. Hambatan Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Meningkatkan Laporan Keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar Provinsi Bali

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan Kepala Bidang Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar dapat diperoleh informasi yang berkaitan terhadap faktor penghambat dalam penerapan SIPD di Kabupaten Gianyar diperoleh beberapa yang yang terdiri dari, sebagai berikut :

1. Sosialisasi, Pelatihan dan Diklat Mengenai Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) belum dilaksanakan dengan rutin

Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar Provinsi Bali masih sangat memerlukan adanya sosialisasi mengenai penerpana Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) agar dapat diketahui secara rinci. Pelaksanaan sosialisasi secara intensif akan mendorong pegawai untuk lebih cepat memahami Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, maupun diklat secara terstruktur dan intensif sangat penting untuk diterapkan untuk mengakselerasi adanya manfaat terhadap Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) secara penuh.

2. Tenaga Pendamping dan Sumber Daya Manusia dari para pegawai di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar yang belum menguasai aplikasi SIPD

Tenaga pendamping yang dimaksud yakni tenaga yang memiliki keahlian dalam bidang IT dan memahami tentang pelaporan keuangan, dimana tenaga dengan kompetensi seperti ini jumlahnya masih terbilang minim di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar dalam menerapkan SIPD. Hal tersebut menjadi salah satu faktor yang menghambat kinerja ataupun efektivitas dari penerapan SIPD di unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar Provinsi Bali.

Sumber daya manusia menjadi suatu faktor yang sangat penting yang harus mendapatkan perhatian lebih. Jumlah aparatur menjadi suatu hal yang mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan, dimana dalam hal ini berkaitan dengan pelaksanaan tugas yang harus diselesaikan dalam rangka melaksanakan tugas yang diemban. Selain itu jumlah pegawai yang ada juga sangat berpengaruh terhadap penyelesaian tugas dan kompetensi aparatur sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan tugas setiap hari dalam pelaporan keuangan, dimana apabila sesuai maka kinerja suatu organisasi akan mengalami suatu intensitas peningkatan yang signifikan.

3. Pemerintah Pusat yang tidak memberikan tindak lanjut terhadap hambatan yang dilaporkan oleh BPKAD Kabupaten Gianyar dalam Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

Kendala yang dilaporkan kepada pemerintah pusat dalam penerapan SIPD di BPKAD Kabupaten Gianyar tidak mendapat tindak lanjut dan respon dari pemerintah pusat. Hal ini menyebabkan pemerintah kabupaten Gianyar, khususnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar Provinsi Bali belum menggunakan SIPD dalam keseluruhan proses pengelolaan keuangan.

4. Sistem pengelolaan keuangan di aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang belum berjalan keseluruhan

Penerapan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar Provinsi Bali belum efektif dalam mencapai indikator sasaran dari teori efektivitas Duncan dalam Richard M. Steers. Hal ini disebabkan oleh penerapan pengelolaan keuangan dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) ini belum dapat terlaksana secara keseluruhan.

3.8. Upaya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar Provinsi Bali untuk Meningkatkan Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

Adapun upaya yang dilakukan dalam meminimalisir hambatan-hambatan yang ada serta memaksimalkan upaya yang dilakukan BPKAD Kabupaten Gianyar Provinsi Bali dalam efektivitas penerapan SIPD dalam meningkatkan pelaporan keuangan di atas adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi, Pelatihan dan Diklat Mengenai Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) belum dilaksanakan dengan rutin
 - a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Gianyar melakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) secara rutin ke Pemerintah Daerah yang sudah menerapkan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) secara menyeluruh di pengelolaan keuangan, sehingga dapat membantu dan memberikan pemahaman dalam penerapan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)
2. Tenaga Pendamping dan Sumber Daya Manusia dari para pegawai di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar yang belum menguasai aplikasi SIPD
 - a. Upaya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar dalam mengatasi kurangnya pendampingan dan sumber daya manusia yaitu dengan mengadakan sosialisasi dengan mengundang narasumber dari Kementerian Dalam Negeri yang bertujuan untuk memberikan informasi dan pelatihan secara langsung kepada pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar Provinsi Bali sehingga pegawai dapat memahami dan dapat meningkatkan kemampuannya dalam mengoperasikan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)
3. Sistem pengelolaan keuangan di aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang belum berjalan keseluruhan
 - a. Upaya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar dalam mengatasi aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang belum dapat menjalankan pengelolaan keuangan secara keseluruhan yaitu dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Next Generation (SIMDA-NG). Aplikasi SIMDA-NG ini digunakan untuk membantu BPKAD Kabupaten Gianyar dalam

pengelolaan keuangannya sehingga dapat menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik.

3.9. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Meningkatkan Pelaporan Keuangan Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar Provinsi Bali belum efektif. Sasaran yang belum dapat terwujud dengan baik, indikator prosedur yang masih mengalami hambatan dikarenakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) ini belum dapat dijalankan secara keseluruhan, indikator prosedur sosialisasi yang belum terlaksana dengan baik yang menyebabkan sumber daya manusia di BPKAD Kabupaten Gianyar tidak dapat memahami penerapan SIPD dengan baik, indikator peningkatan kemampuan yang belum efektif dikarenakan SIPD belum dapat memberikan perubahan yang signifikan terhadap output laporan keuangan BPKAD Kabupaten Gianyar. Sehingga dalam penerapan SIPD di BPKAD Kabupaten Gianyar belum bisa dikatakan efektif sepenuhnya.

3.10. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Terdapat beberapa hambatan Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Meningkatkan Laporan Keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar. Selain itu juga telah dilakukan beberapa upaya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar Provinsi Bali untuk Meningkatkan Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Meningkatkan Pelaporan Keuangan Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar Provinsi Bali belum efektif. Hal ini terlihat pada analisis penulis dengan menggunakan teori efektivitas Duncan dalam Richard M. Steers dimana indikator sasaran yang belum dapat terwujud dengan baik, diantaranya indikator prosedur, indikator prosedur sosialisasi, indikator peningkatan kemampuan yang belum efektif dikarenakan SIPD belum dapat memberikan perubahan yang signifikan terhadap output laporan keuangan BPKAD Kabupaten Gianyar. Sehingga dalam penerapan SIPD di BPKAD Kabupaten Gianyar belum bisa dikatakan efektif sepenuhnya. Selain itu juga terdapat hambatan Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Meningkatkan Laporan Keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar. Disisi lain Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar Provinsi Bali juga telah melakukan upaya untuk Meningkatkan Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan pokok khususnya dalam hal alokasi waktu serta biaya penunjang untuk melakukan kajian penelitian lebih mendalam

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari bahwa adanya waktu penelitian yang terbatas maka diperlukan suatu penelitian lanjutan pada lokasi yang sama berkaitan dengan Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Meningkatkan Pelaporan Keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar beserta jajarannya yang telah memberikan bantuan informasi untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta:Graha Ilmu
- Bali Express. 2021. *Terkendala Aplikasi SIPD, Gaji PNS di Gianyar Belum Cair*. 10 Oktober 2022 10.00 WIB (<https://baliexpress.jawapos.com/bali/05/01/2021/terkendala-aplikasi-sipd-gaji-pns-di-gianyar-belum-cair/>)
- Bappeda Kaltim. 2021. *Sosisalisasi SIPD*. 10 Oktober 2022 10.30 WIB (<https://bappeda.kaltimprov.go.id/postingan/sosialisasi-aplikasi-sipd>)
- Dione, F. & Faradina, U. 2020. *Implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dalam Meningkatkan Koordinasi Pembangunan di Daerah*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri: *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 3(1), 21–28.

- Ekaputra, Nanda Dias. 2021. *Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Dalam Penyusunan Dokumen RKPD di Kabupaten Nganjuk*. Universitas Islam Kadiri: Ejournal
- Halim, Abdul dan Muhammad Iqbal. 2012 *Pengelolaan Keuangan Daerah Seri Bunga Rampai*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Harahap, M. Zakky. 2021. *Evaluasi Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Untuk Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Good Governance di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri: Jurnal Politik Science
- Latifa, Asma. 2020. *Efektivitas SIPKD Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Payakumbuh*.
- Masruri. 2014. *Analisis efektivitas Program Nasional Pemberdayaan masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-PM). Pada Kecamatan Banyu Kabupaten Bulunga*. Universitas Kaltara: Governance and public policy
- Masururi. 2014. *Analisis Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan*. Padang: Akademia Permata.
- Nurwati & Nasution, M. Irfan. 2021. *Analisis Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara: Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Volume 9, Nomor 2
- Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Prameswari, Nadya. 2021. *Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Terhadap Perolehan Opini Audit BPK Tahun 2021 di Kabupaten Purbalingga*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri: Jurnal Keuangan
- Sinurat dan Panjaitan. 2022. *Pendapatan Komuter Berpengaruh Terhadap Konsumsi Dan Tabungan Keluarga Di Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun (Perspektif Pengembangan Wilayah)*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

